

KEARIFAN LOKAL DAN LITERASI BUDAYA



**Dadan Ramdani
Evi Noviwati
Dian Diana Gunawan
Bilqis Nabi Fariz
Asep Saeful Hidayat**



KEARIFAN LOKAL DAN LITERASI BUDAYA

KEARIFAN LOKAL DAN LITERASI BUDAYA

**Dadan Ramdani
Evi Noviawati
Dian Diana Gunawan
Bilqis Nabi Fariz
Asep Saeful Hidayat**



KEARIFAN LOKAL DAN LITERASI BUDAYA

© Penerbit Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI)

Penulis:

Dadan Ramdani
Evi Noviwati
Dian Diana Gunawan
Bilqis Nabi Fariz
Asep Saeful Hidayat

Editor: Rusli

Cetakan Pertama: September 2025

Cover: Tim Penyusun

Tata Letak: Tim Kreatif PRCI

Hak Cipta 2025, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website: www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail: rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2025 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I - : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2025
Dimensi : 14,8 x 21 cm

ISBN

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku *Kearifan Lokal dan Literasi Budaya* dapat hadir di tengah pembaca. Buku ini disusun sebagai upaya untuk mengenalkan, menghidupkan kembali, sekaligus memperkuat pemahaman masyarakat mengenai kekayaan budaya lokal yang dimiliki bangsa Indonesia.

Dalam arus globalisasi yang begitu deras, budaya lokal seringkali terpinggirkan. Padahal, nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya merupakan fondasi penting bagi pembentukan karakter bangsa. Melalui buku ini, penulis berusaha menggali dan menyajikan berbagai tradisi, ajaran, serta praktik budaya yang bukan hanya bernilai historis, tetapi juga relevan dengan kehidupan generasi masa kini.

Literasi budaya yang diangkat dalam buku ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran bahwa budaya tidak sekadar warisan masa lalu, melainkan sumber inspirasi yang hidup dan terus berkembang. Dengan memahami kearifan lokal, pembaca dapat menemukan nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan perdamaian yang sangat dibutuhkan di era modern.

Buku ini hadir bukan hanya untuk kalangan akademisi, tetapi juga untuk masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, guru, hingga pemerhati budaya. Harapannya, setiap pembaca dapat memperoleh pengetahuan baru, memperkuat rasa cinta tanah air, sekaligus termotivasi untuk ikut melestarikan budaya lokal di lingkungannya masing-masing.

Akhir kata, semoga buku ini memberikan manfaat nyata dan menjadi salah satu referensi penting dalam memperkaya literasi budaya bangsa. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi, sehingga buku ini dapat terwujud.

Tasikmalaya, September 2025

Penerbit Rumah Cemerlang Indonesia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 PANCASILA DALAM NASKAH SANGHYANG SIKSA KANDANG KARESIAN	1
A. <i>Sanghyang Siksa Kandang Karesian</i> sebagai Sebuah Warisan Filsafat Sunda	5
B. Keselarasan Nilai Pancasila dalam Sanghyang Siksa Kandang Karesian	8
BAB 2 MANAJEMEN PENDIDIKAN YANG BERAKAR PADA KEARIFAN BUDAYA.....	16
A. Perencanaan Strategi Penerapan Manajemen Pendidikan Berbasis Konservasi Nilai-Nilai Kearifan Budaya.....	19
B. Strategi Penerapan Manajemen Pendidikan Berbasis Konservasi Nilai-Nilai Kearifan Budaya	25
BAB 3 TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK MELESTARIKAN BUDAYA.....	33
BAB 4 PAGUYUBAN PUSEUR GALUH DAN PERAN PEMUDA DALAM MELESTARIKAN BUDAYA.....	44
A. Sejarah dan perkembangan Paguyuban <i>Puseur Galuh</i>	47
B. Keterlibatan Pemuda dan Pemulihan Identitas Budaya Lokal di Era Globalisasi	51
BAB 5 KEARIFAN KAMPUNG ADAT KUTA DAN KRISIS MORAL MAHASISWA	66

BAB 6 TRADISI SALAM PACANTEL DAN PESAN PERDAMAIAN.....	76
BAB 7 KEARIFAN LOKAL OLAHRAGA TRADISIONAL BEBENTENGAN	90
A. Sejarah Permainan Tradisional Bebentengan	91
B. Nilai-Nilai Kearifan Lokal yang terdapat dalam Permainan Tradisional Bebentengan.....	93
C. Implementasi Permainan Tradisional <i>Bebentengan</i> pada Pembelajaran PJOK di Sekolah Dasar.....	101
DAFTAR PUSTAKA	107

BAB 1

PANCASILA DALAM NASKAH SANGHYANG SIKSA KANDANG KARESIAN

Pancasila dianggap sebagai prinsip utama kehidupan berbangsa dan bernegara serta merupakan falsafah hidup yang bercita-cita luhur. Pancasila memberikan gagasan-gagasan penting yang harus dipatuhi dan digunakan oleh seluruh warga negara dalam segala aspek kehidupannya sebagai landasan negara dan falsafah nasional. Sebagai tanda pengabdian kepada kerukunan, keadilan, dan kebaikan bersama, setiap orang dituntut untuk tidak hanya memahami tetapi juga secara aktif mengamalkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Dengan menetapkan Pancasila sebagai suatu aturan, masyarakat dapat menghormati hak dan tanggung jawabnya sebagai negara yang berdaulat dan menciptakan kehidupan yang damai dan berlandaskan moral (Murya et al., 2023).

Pancasila merupakan fondasi utama yang harus menjadi pijakan dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan seharusnya senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pancasila tidak hanya menjadi simbol atau dokumen historis, melainkan juga harus diinternalisasi sebagai panduan etis dan ideologis dalam membangun kehidupan bernegara yang adil, demokratis, dan berkeadaban. Gagasan ini pertama kali diungkapkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 di hadapan sidang perdana Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam pidato tersebut, Soekarno menekankan bahwa Pancasila harus dijadikan dasar negara sebuah filosofi yang menyatukan keragaman bangsa dan menjadi pedoman hidup bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemikiran inilah yang kemudian menjadi titik tolak pembentukan identitas ideologis bangsa Indonesia.

Pendapat tersebut mendapat dukungan penuh dari seluruh anggota sidang BPUPKI. Selanjutnya, konsep Pancasila sebagai dasar negara dibahas lebih lanjut oleh sebuah panitia kecil yang dikenal sebagai Panitia Sembilan. Panitia ini kemudian merumuskan konsep yang dikenal sebagai "Rancangan Hukum Dasar", yang kemudian atas saran Muhammad Yamin diubah namanya menjadi Piagam Jakarta. Setelah melalui berbagai pembahasan dan penyempurnaan, rancangan tersebut akhirnya disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menjadi bagian dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bersamaan dengan itu, Pancasila juga secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia, meskipun dalam perjalanannya mengalami beberapa perubahan demi menyesuaikan dengan kepentingan seluruh bangsa Indonesia (Sari & Najicha, 2022).

Hal ini menunjukkan bahwa asas-asas yang tertuang dalam butir-butir Pancasila telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Nusantara, sebagaimana dibuktikan oleh isi naskah *Sanghyang Siksa Kandang Karesian*. Keselarasan ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip moral dan etika yang diajarkan dalam naskah tersebut telah menjadi bagian dari budaya dan tata nilai masyarakat jauh sebelum Pancasila diformalkan sebagai dasar negara. Oleh karena itu, pemahaman terhadap *Sanghyang Siksa Kandang Karesian* tidak hanya memperkaya wawasan sejarah mengenai asal-usul

nilai-nilai Pancasila, tetapi juga dapat memperkuat kesadaran masyarakat dalam mengamalkan Pancasila secara lebih mendalam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menelaah kembali ajaran-ajaran yang terkandung dalam warisan budaya tersebut, diharapkan masyarakat semakin memahami bahwa Pancasila bukan sekadar konsep normatif, tetapi juga pedoman yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan sosial dan pemerintahan di Nusantara.

Keberadaan naskah *Sanghyang Siksakandang Karesian* pertama kali dipublikasikan secara lebih luas oleh Atja dan Saleh Danasasmita pada tahun 1981. Publikasi ini merupakan kelanjutan dari temuan awal yang pernah dicatat oleh K.F. Holle pada tahun 1867. Dalam laporannya, Holle menyebutkan bahwa Raden Saleh telah menyerahkan tiga naskah berbahasa Sunda Kuno kepada *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* (BGKW), salah satunya kemudian diidentifikasi sebagai naskah *Sanghyang Siksakandang Karesian* (SSK). Naskah ini kini tersimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan kode Kropak 630 dan diperkirakan berasal dari tahun 1518 Masehi. Temuan ini menjadi penting karena membuka akses terhadap salah satu sumber primer yang kaya akan ajaran moral, sosial, dan kebudayaan masyarakat Sunda pada masa lampau (Nurwansah, 2013).

Naskah *Sanghyang Siksa Kandang Karesian* (SSKK) ini tertuang dalam sebuah kropak tahun 630, yang ditulis pada tahun 1440 Saka atau 1518 M. Naskah ini diperkirakan ditulis oleh Sri Baduga Maharaja yang memerintah Pakuan Pajajaran dari tahun 1482 hingga 1521 M. Naskah ini memuat informasi praktis tentang kehidupan sosial sehari-hari, disertai dengan

aturan-aturan umum atau nasihat-nasihat bagi kehidupan masyarakat *Hulun* pada saat itu (Nurwansah, 2020).

Naskah Sanghyang Siksakandang Karesian merupakan salah satu karya sastra Sunda Kuno yang sarat dengan nilai-nilai moral, spiritual, dan etika kehidupan. Jika dilihat dari isinya, naskah ini dapat dimaknai sebagai sebuah pedoman hidup yang mengajarkan cara untuk menjadi pribadi yang bijaksana (arif), dengan landasan utama berupa ajaran darma, yaitu prinsip kebenaran, keadilan, dan kebajikan (Wijayanti et al., 2024). Dalam naskah *Sanghyang Siksa Kandang Karesian*, terdapat berbagai ajaran yang selaras dengan butir-butir Pancasila pada saat ini. Ajaran-ajaran ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman spiritual dan etika individu, tetapi juga memberikan arahan dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Keberadaan naskah ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila sejatinya telah lama dianut oleh masyarakat Nusantara sebelum akhirnya dirumuskan secara formal sebagai ideologi bangsa.

Sanghyang Siksakandang Karesian (SSK) merupakan salah satu manuskrip yang memuat saripati nilai-nilai Pancasila. Butir-butir Pancasila yang terungkap dalam manuskrip Sanghyang Siksakandang Karesian III, dapat dijabarkan melalui Panca Tata Gatra. Naskah ini berisi kearifan lokal berupa gagasan, pemikiran, landasan, dan filsafat hidup yang digali dari berbagai perspektif, termasuk sudut pandang budaya. Nilai-nilai tersebut perlu dimaknai dan diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Sumarlina et al., 2023).

Oleh karena itu, mengkaji hubungan antara nilai-nilai dalam *Sanghyang Siksa Kandang Karesian* dengan butir-butir Pancasila menjadi penting, baik dari perspektif historis

maupun sebagai upaya untuk memperkokoh implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami jejak nilai-nilai Pancasila dalam warisan budaya bangsa, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan mengamalkan ajaran-ajaran luhur tersebut dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga Pancasila tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi juga menjadi pedoman yang benar-benar diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

A. *Sanghyang Siksa Kandang Karesian* sebagai Sebuah Warisan Filsafat Sunda

Sanghyang Siksa Kandang Karesian (SSKK) merupakan teks Sunda Kuno berbentuk prosa didaktis yang menguraikan berbagai aturan dan ajaran tentang kebijaksanaan hidup berdasarkan prinsip darma. Naskah ini bersifat ensiklopedis, menyajikan pedoman moral umum yang menjadi landasan kehidupan bermasyarakat pada zamannya. Selain itu, teks ini juga memuat beragam ilmu yang diperlukan untuk menjalani kehidupan sehari-hari secara praktis. Penyampaiannya berfokus pada realitas kehidupan dalam suatu negara, dengan tujuan agar ajaran-ajaran di dalamnya dapat diajarkan oleh orang bijak kepada mereka yang ingin meraih kebahagiaan (Nurwansah, 2020).

Manuskrip *Sanghyang Siksakandang Karesian* yang tersimpan dalam kropak 630 mengandung ajaran yang jika ditelaah dari segi isi, istilah *siksakandang karesian* dapat dimaknai sebagai 'bagian dari aturan atau ajaran yang menekankan hidup bijak dan arif berdasarkan prinsip darma'. Berdasarkan prinsip darma inilah, naskah ini menyajikan sudut pandang tersendiri

mengenai moksa, yang berbeda dari pemahaman dalam ajaran keagamaan yang lebih khusus seperti yang terdapat dalam *Sewaka Darma*. Dalam konteks naskah ini, kata *karesian* tidak secara khusus dikaitkan dengan pengertian biara atau tempat tinggal para resi, melainkan lebih merujuk pada makna kebijaksanaan, kewaspadaan, dan kedewasaan dalam menjalani hidup sesuai nilai-nilai darma.

Menariknya, pada bagian akhir naskah disebutkan tokoh 'Sang Sewaka Darma' yang dijadikan sebagai panutan atau sumber pedoman moral. Hal ini menunjukkan bahwa naskah ini tetap mengakui otoritas ajaran darma sebagai landasan etika dan moral. Namun demikian, isi ajarannya secara umum tidak ditujukan kepada para resi atau kaum spiritualis semata, melainkan lebih banyak menysasar kalangan awam atau rakyat biasa (*hulun*), khususnya dalam konteks pelaksanaan kewajiban mereka terhadap raja. Jadi, naskah ini juga berfungsi sebagai panduan hidup sosial dan etika dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat umum (Darsa, 1998).

Naskah *Sanghyang Siksakandang Karesian* memuat uraian dan ungkapan tentang sepuluh kesejahteraan (*dasakreta*), sepuluh bhakti (*dasa prebakti*), sepuluh alat indera (*panca indriya*), istilah bagi anggota keluarga, dan penjelasan lima realitas yang berlangsung (*panca tatagata*), yang meliputi lima tulisan (*panca aksara*), lima pelindung (*panca byapara*), lima putra Sang Kandiawan (*panca putra*), lima orang bijak yang merupakan murid Siwa (*panca kusika*), dan pembagian lima penjuru mata angin beserta warna dan dewa yang menghuninya (*sanghyang wuku lima*). Selain itu terdapat pula larangan dan anjuran dalam berbagai aspek kehidupan manusia, berikut judul cerita pantun, permainan, kawih, formasi perang, senjata, makanan, motif kain, mantra, tanda-

tanda alam, ajaran, cara mengukur tanah, pelabuhan, harga, kode, bahasa, pekerjaan, dan keterampilan, serta cara mengukur tanah, pelabuhan, harga, pekerjaan, pekerjaan, keterampilan, pekerjaan, keterampilan, dan tanda-tanda alam. Di dalamnya juga terdapat penjelasan tentang ungkapan *trigeuing*, *tritangtu*, dan *triwarga*, sifat-sifat kebijaksanaan, kebajikan, dan etika, serta contoh-contoh perbuatan manusia yang baik dan buruk serta daerah-daerah yang kotor. Di antara beberapa naskah Sunda kuno dalam bentuk prosa, teks SSKK dapat disejajarkan dengan *Tatwa Ajnyana*, *Tutur Bwana*, dan *Sanghyang Sasana Maha Guru*.

Naskah *Sanghyang Siksa Kandang Karesian* terbagi ke dalam tiga bagian utama. Bagian pertama merupakan bagian pengantar yang memuat penjelasan mengenai sepuluh asas penting, yaitu *dasakerta* dan *dasaperbakti*. Di dalamnya juga dijelaskan tentang sikap ideal seorang rakyat (*hulun*) terhadap rajanya (*karma ning hulun*), serta bagaimana seseorang seharusnya menyelesaikan tindakan atau perbuatannya (*panimbuh ning twah*). Sebagai naskah gebang yang bukan ditulis di atas daun lontar maka naskah ini termasuk dalam kategori *kabuyutan* atau *mandala* (*pikabuyutaneun*), yang artinya isinya dapat disampaikan secara lisan dan diwariskan secara turun-temurun (Nurwansah, 2020). Sastrawan dan budayawan Ajip Rosidi menyatakan bahwa ajaran-ajaran yang terdapat dalam naskah ini mencakup tiga aspek penting: pertama, panduan tentang bagaimana manusia sebaiknya menjalani kehidupan; kedua, cara mengendalikan keinginan dan nafsu dalam kehidupan bermasyarakat; dan ketiga, upaya membentuk lingkungan sosial yang positif yakni tempat seseorang dilahirkan, tumbuh, dan dibesarkan yang secara tidak langsung membentuk karakter individu dalam masyarakat (Dewantara, 2013).

B. Keselarasan Nilai Pancasila dalam Sanghyang Siksa Kandang Karesian

Naskah *Sanghyang Siksa Kandang Karesian*, yang diyakini ditulis sekitar tahun 1518 Masehi, memuat berbagai ajaran tentang kehidupan bermasyarakat yang memiliki kemiripan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Nilai-nilai tersebut sebenarnya bisa dikaji dari beragam sudut pandang ilmu, tidak hanya dari aspek budaya semata. Penelitian terhadap naskah ini bisa melibatkan disiplin ilmu lain seperti sosial, politik, etika, filsafat, komunikasi, bahkan hukum. Pendekatan lintas disiplin ini justru akan memperkaya pemahaman terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Meski begitu, tantangan terbesar terletak pada tingkat kesulitan dalam memahami isi naskah, terutama jika peneliti tidak menguasai aksara, bahasa, serta konteks budaya asal naskah tersebut (Sumarlina et al., 2021).

Nilai-nilai Pancasila yang tersirat dalam teks kuno dikenal dengan istilah *Panca Tata Gatra*. Nilai-nilai ini terungkap melalui bagian ketiga dari naskah *Sanghyang Siksakandang Karesian* (SSK), yang memuat lima unsur utama sebagai dasar tatanan kehidupan, diantaranya:

1. Kewajiban Menyembah Sanghyang Yang Maha Kuasa

Ajaran ini dikenal sebagai *Sembah Ing Hun di Sanghyang Panca Tatagatra*, yang menekankan pentingnya penyembahan kepada Tuhan sebagai penguasa alam semesta. Naskah SSKK menekankan pentingnya kehidupan spiritual dan hubungan manusia dengan Yang Maha Kuasa. Dalam naskah ini, terdapat

ajaran tentang penghormatan terhadap kekuatan spiritual dan pentingnya menjalani hidup dengan kesadaran akan keberadaan Sang Pencipta. Konsep ini sejalan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Timbangan Keadilan dan Kebijaksanaan

Konsep ini dikenal dengan sebutan *Panca Gati*, yang tercermin dalam ungkapan *Jaga Rang Dek Luput Ing Na Pancagati Sangsara*, yang berarti pentingnya menjaga diri agar tidak terjerumus dalam lima bentuk perilaku buruk. *Panca Gati* menggambarkan lima aspek mendasar dari perilaku manusia, mencakup tindakan yang pantas maupun yang tidak layak dilakukan. Ajaran ini menekankan pentingnya menegakkan keadilan dan kebijaksanaan dalam setiap tindakan, sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*.

3. Kesatuan Lima Unsur Alam

Lima unsur utama alam, yaitu angkasa (*Akasa*), angin (*Bayu*), cahaya (*Téja*), air (*Apah*), dan tanah (*Pratiwi*), harus berada dalam keadaan harmonis dan bersatu, konsep ini disebut *Panca Byapara Kusika*. Naskah ini juga menekankan pentingnya kerukunan dan persatuan dalam kehidupan sosial. Salah satu ajaran dalam SSKK menekankan bahwa masyarakat harus hidup dalam harmoni dan menghindari perpecahan. Hal ini selaras dengan sila ketiga Pancasila yang mencerminkan nilai sila Persatuan Indonesia.

4. Peran Sosial dan Mata Pencaharian Masyarakat

Konsep *Panca Putra*, yang terdiri atas *Kusika*, *Garga*, *Mésti*, *Purusa*, dan *Patanjala*, merepresentasikan berbagai peran sosial yang dijalani manusia dalam kehidupan sehari-hari. Masing-masing tokoh ini melambangkan profesi atau kedudukan tertentu, mulai dari petani, penyadap atau pembuat gula, pemburu atau prajurit, kalangan bangsawan, hingga pemimpin tertinggi seperti raja. Pembagian peran ini mencerminkan struktur sosial yang terorganisir dan harmonis, di mana setiap individu memiliki fungsi dan tanggung jawab yang saling melengkapi. Nilai-nilai yang terkandung dalam konsep ini sejalan dengan sila keempat Pancasila, yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, karena mengedepankan prinsip musyawarah, tanggung jawab sosial, dan kepemimpinan yang bijak dalam menjalankan peran masing-masing dalam masyarakat.

5. Tiga Pilar Berbangsa dan Bernegara

Dikenal sebagai *Tri Tangtu di Bwana/Bumi*, yang terdiri dari *Jagat Palangka* di *Sang Prabu* (raja), *Jagat Darana* di *Sang Rama* (orang tua), dan *Jagat Kreta* di *Sang Resi* (pendeta/penasehat spiritual) (Sumarlina et al., 2021). Pembagian kekuasaan dalam struktur sosial masyarakat Sunda kuno tercermin dalam naskah *Fragmen Carita Parahiyangan* dan *Sanghyang Siksakandang Karesian* (SSK). Kedua naskah tersebut menunjukkan adanya sistem pengelolaan kekuasaan yang terbagi ke dalam peran-peran

tertentu dalam masyarakat. Menariknya, pola pembagian kekuasaan ini memiliki kemiripan dengan konsep *trias politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu dalam sistem pemerintahan modern, di mana kekuasaan dibagi menjadi tiga pilar utama: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Meski berkembang dalam konteks dan zaman yang berbeda, kesamaan ini menunjukkan bahwa prinsip keseimbangan dan pemisahan kekuasaan sudah dikenal sejak masa lalu dalam kebudayaan lokal Nusantara, termasuk dalam tradisi Sunda. Dalam konteks Sunda, pembagian tersebut melibatkan tiga tokoh sentral, yaitu *Prebu*, *Sang Rama*, dan *Sang Resi*. Dalam naskah SSK, mereka masing-masing memiliki peran khusus yang sepadan dengan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam pemerintahan masa kini.

Prebu yang dalam naskah disebut sebagai *Sang Prebu* berperan sebagai pemimpin pemerintahan atau penguasa tertinggi yang setara dengan presiden dalam sistem pemerintahan modern. Ia bertanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan di tingkat pusat. Seorang *Prebu* harus memiliki karakter yang kuat dan berprinsip teguh, digambarkan dengan istilah *ngagurat batu*, yang berarti kokoh dan tidak mudah goyah. Ia juga dituntut untuk menegakkan hukum secara adil dan jujur. Sifat yang ideal bagi seorang pemimpin ini dirangkum dalam ungkapan *saciduh metu saucap nyata*, yang bermakna “apa yang diucapkan harus sejalan dengan tindakan,” serta dijalankan dalam koridor yang benar dan terarah.

Kelompok *Rama* dalam sistem kekuasaan Sunda kuno berperan seperti lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem pemerintahan modern. Golongan ini merupakan perwakilan rakyat yang dipandang bijaksana, dituakan, dan dipercaya untuk mengemban tanggung jawab

besar dalam menyusun serta menetapkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Karakter yang harus dimiliki oleh golongan Rama digambarkan dengan istilah *ngagurat lemah*, yang berarti adil, bijak, dan penuh pertimbangan. Peraturan yang mereka tetapkan harus dijalankan dan diimplementasikan di tengah masyarakat.

Golongan ini juga mencakup unsur keluarga, tokoh masyarakat, dan para pemuka yang memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial. Keluarga memegang peran sentral, terutama dalam pendidikan informal yang membentuk karakter dan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks ini, ibu memiliki posisi penting sebagai ujung tombak pendidikan karakter anak-anaknya, meskipun peran ayah tentu juga tidak boleh diabaikan. Ketahanan dan kekuatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh soliditas dan daya tahan keluarga sebagai unit terkecil dalam kehidupan sosial. Selain itu, pendidikan formal dan nonformal juga memiliki peranan penting dalam mendukung kemajuan bangsa. Semua aspek ini berkaitan erat dengan nilai-nilai Pancasila, yang menjadi dasar moral, etika, dan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Golongan *Resi* dalam struktur kekuasaan Sunda kuno menjalankan peran yang sepadan dengan lembaga yudikatif dalam sistem pemerintahan modern. Mereka terdiri atas kelompok cendekiawan, para pendidik, tokoh agama, alim ulama, serta individu-individu yang memiliki kemampuan dan wewenang dalam menegakkan hukum. Dalam konteks kekinian, peran ini dapat disamakan dengan lembaga seperti Mahkamah Agung.

Karakter utama yang melekat pada golongan Resi adalah *ngagurat cai*, yang berarti memiliki sifat menyejukkan, bijak,

dan mampu meredam konflik, terutama dalam urusan hukum dan peradilan. Para Resi tidak hanya berperan sebagai penegak keadilan, tetapi juga sebagai pembina dan pembimbing masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, maju, serta bermanfaat bagi kehidupan bersama.

Lebih dari sekadar penegak hukum, golongan Resi dituntut menjadi teladan moral dalam kehidupan sosial. Mereka dituntut untuk menjadi teladan yang mampu membimbing, melindungi, dan mengarahkan masyarakat ke arah kehidupan yang lebih bermartabat yang menjunjung nilai keadilan, kesejahteraan, dan kebaikan bersama. Dengan demikian, peran Resi sangat strategis dalam menjaga tatanan sosial dan mendukung terwujudnya cita-cita bangsa (Sumarlina et al., 2021).

Struktur kepemimpinan ini menegaskan pentingnya keseimbangan dalam pemerintahan dan kehidupan sosial, yang sejalan dengan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Sumarlina et al., 2021).

Bagian IV dari naskah *Sanghyang Siksakandang Karesian* (SSK) menguraikan butir-butir nilai Pancasila yang dikaitkan dengan konsep kosmologis tentang *kahyangan*, tempat bersemayam para dewa *Lokapala* yang berperan sebagai penjaga sekaligus pembawa kedamaian bagi alam semesta. Penggambaran ini disusun berdasarkan arah mata angin yang masing-masing memiliki warna simbolik tersendiri. Kelima arah ini diwakili sebagai simbol dari lima kemakmuran yang mencakup seluruh wilayah, yang dijaga oleh para dewa seperti yang disebutkan dalam teks *Sanghyang Wuku Lima Di Bwana, Halimpu I kang Désa Kabéh*. Setiap penjuru arah tersebut memiliki makna dan kekuatan yang khas, yaitu:

1. Arah timur (*wétan* atau *Purwá*), yang berwarna putih, menjadi tempat kediaman Dewa Isora.
2. Arah selatan (*Daksina* atau *kidul*), yang berwarna merah, dijaga oleh Dewa Brahma.
3. Arah barat (*Pasima* atau *kulon*), yang berwarna kuning, dilindungi oleh Dewa Mahadewa.
4. Arah utara (*kalér*), berwarna hitam, dengan Dewa Wisnu sebagai pelindungnya.
5. Arah tengah (*madya*), yang dilambangkan dengan warna-warni, merupakan pusat kekuatan yang menjadi tempat bersemayam Dewa Siwa (Sumarlina et al., 2020).

Penggambaran ini mencerminkan keteraturan kosmis yang sejalan dengan prinsip-prinsip moral dan spiritual, sebagaimana dijelaskan dalam konteks budaya Sunda kuno. Dengan demikian, ajaran dalam teks ini bukan hanya bersifat simbolik, tetapi juga memiliki makna mendalam yang selaras dengan nilai-nilai dasar Pancasila.

Sanghyang Siksa Kandang Karesian (SSKK) adalah naskah Sunda Kuno yang kaya akan nilai filosofis dan didaktis. Selain berfungsi sebagai pedoman moral dan sosial, naskah ini juga menjadi sumber pengetahuan yang mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari etika, kepercayaan, hingga praktik keseharian masyarakat Sunda pada masa itu. Ajaran-ajaran yang terkandung dalam naskah ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Salah satu contohnya terlihat pada konsep *Panca Tata Gatra*, yang menggambarkan kelima sila Pancasila, termasuk aspek Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan Sosial.

Naskah SSKK mengajarkan pentingnya kehidupan spiritual yang selaras dengan prinsip keadilan dalam bertindak, keseimbangan alam, dan harmoni dalam hubungan sosial. Selain itu, ia juga menekankan peran dan tanggung jawab individu dalam masyarakat. Oleh karena itu, SSKK dapat dipandang sebagai warisan budaya yang mengandung nilai-nilai luhur, yang tetap relevan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam upaya membangun masyarakat yang berlandaskan pada kebijaksanaan, moralitas, dan keadilan.

BAB 2

MANAJEMEN PENDIDIKAN YANG BERAKAR PADA KEARIFAN BUDAYA

Pendidikan di Indonesia bukan jadi kewajiban bagi setiap anak bangsa tapi sudah menjadi kebutuhan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Berbagai tantangan lembaga pendidikan terutama jenjang pendidikan dasar dan menengah, saat ini semakin kompleks. Dibalik itu optimalisasi mutu lulusan sesuai dengan tuntutan ketercapaian tujuan pendidikan nasional, bukan hanya aspek pengetahuan dan pengalaman akademik peserta didik, tetapi lebih kepada kebermaknaan hasil dari proses pendidikan terhadap kehandalan dalam kehidupan masa depan dan kehidupan dilingkungan masyarakat. Pendidikan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup dengan cara memanusiaikan manusia. Tantangan Pendidikan sangat ditentukan oleh seberapa besar pengaruh sekolah terhadap meningkatkan mutu Pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk membangun dan meningkatkan mutu sumber daya manusia di era globalisasi yang penuh tantangan. (Dwi Prasetyawati Diah Hariyant. 2023).

Salah satu komponen sasaran ancaman dan tantangan dalam manajemen mutu pendidikan, diantaranya adalah kepunahan dan kehancuran nilai-nilai kearifan budaya bangsa dan kelompok masyarakat, serta nilai-nilai luhur karakter bangsa, yang hampir secara keseluruhan bermuara pada nilai-nilai kearifan budaya. Maka dipandang sebagai bentuk kebijakan dan strategi yang sangat mendesak proses penerapan sistem

manajemen pendidikan berbasis konservasi nilai-nilai kearifan budaya sebagai bentuk upaya dalam proses kelestarian jati diri bangsa dan pembentukan karakter yang melandasi kekuatan soft skill mutu lulusan dan kelayakan dalam kehidupan yang bermartabat. (Asep Saepul Hidayat. 2025).

Era globalisasi membawa dampak ke semua lini, termasuk dalam dunia Pendidikan. Perubahan yang dimaksud dimulai dari pengelolaan baik penataan, tanggung jawab termasuk dalam pelaksanaan pembelajaran. Tentu hal ini akan berdampak pada pengembangan dan mutu Pendidikan itu sendiri. Dampak lain dalam globalisasi terlihat dalam manajemen sekolah sebagai pelaksana utama Pendidikan. Dengan demikian akan terjadi perubahan tujuan Pendidikan untuk menghasilkan insan yang bertanggung jawab, mampu melaksanakan tugas, dan mampu bertahan di era globalisasi ini. Meningkatkan mutu Pendidikan di era globalisasi pada akhirnya akan melibatkan semua pihak baik pendidik, kepala sekolah, yayasan (Hendarman, 2019).

Perubahan yang terjadi secara menyeluruh harus disikapi dengan cermat oleh semua pihak, karena sebagai cara untuk mempertahankan diri dan meningkatkan kualitas terutama dalam bidang Pendidikan. Perubahan yang signifikan akan terlihat dalam penggunaan teknologi dalam semua bidang. Sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya pergeseran aturan-aturan yang berlaku di masyarakat, budaya dan lingkungan masyarakat. Aktivitas masyarakat yang akan didominasi dengan penggunaan teknologi sehingga interaksi secara sosial akan berkurang. (Dewi, 2019).

Munculnya teknologi secara global yang semakin pesat, hal ini juga mempengaruhi di dunia pendidikan, sehingga dituntut

untuk mampu beradaptasi dengan mengembangkan kompetensi yang dimiliki sebagai bentuk meningkatkan mutu dalam menjawab globalisasi. Dalam bahasan kajian ini membahas tentang mutu pendidikan di era globalisasi melalui penerapan sistem manajemen pendidikan berbasis konservasi nilai-nilai kearifan budaya, dimana cara yang diterapkan untuk mempertahankan mutu pendidikan. Pembahasan mengarah pada cara peningkatan mutu di dunia pendidikan. Kualitas pendidikan merupakan syarat wajib bagi Lembaga pendidikan sebagai cara untuk mempertahankan kualitas peserta didik yang dihasilkan. Sehingga masukan, proses sampai hasil dari lembaga telah memenuhi keinginan dari masyarakat secara umum dan lulusannya mampu bersaing di dunia kerja. Dalam mewujudkan kualitas pendidikan tersebut maka harus memperhatikan ciri/karakteristik (Sonia, 2022).

Untuk mengungkap penerapan sistem manajemen pendidikan berbasis konservasi nilai-nilai kearifan budaya, perlu dikaji aspek tentang : (1) perencanaan strategi; (2) strategi khusus dalam manajemen pendidikan berbasis konservasi nilai-nilai kearifan budaya; (3) prosedur pelaksanaan sistem manajemen pendidikan berbasis konservasi nilai-nilai kearifan budaya; (4) Indikator keberhasilan proses penerapan sistem manajemen pendidikan berbasis konservasi nilai-nilai kearifan budaya; (5) evaluasi, pengembangan dan tindak lanjut proses manajemen pendidikan berbasis konservasi nilai-nilai kearifan budaya, kearah yang lebih optimal.

Rasionalisasi pentingnya penerapan sistem manajemen pendidikan berbasis konservasi nilai-nilai kearifan budaya khususnya pada satuan pendidikan dasar dan menengah, sebagaimana dijelaskan oleh tim penulis pada bab sebelumnya, bahwa pada hakekatnya upaya ini bertujuan untuk

optimalisasi pencapaian tujuan pendidikan nasional, yakni: untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Pernyataan tersebut, dapat dianalisa bahwa sesungguhnya tujuan pendidikan memiliki arah untuk membentuk lulusan yang berkarakter mulia yang sarat dengan aspek soft skill hingga mampu menantang aspek negatif dalam perkembangan kehidupan masyarakat pada era globalisasi ini.

A. Perencanaan Strategi Penerapan Manajemen Pendidikan Berbasis Konservasi Nilai-Nilai Kearifan Budaya

Pada hakekatnya, mutu sistem manajemen pendidikan khususnya pada tingkat persekolahan, akan bermuara pada kompetensi manajerial kepala sekolah, sebagaimana menurut Ading RS dan Asep Saepul H (2024) dinyatakan bahwa : Sebagai pemimpin pendidikan, kepala sekolah perlu memiliki kompetensi dasar yang disyaratkan. Kompetensi dasar ini didasarkan kepada fondasi teoritis yang berasal dari Kantz (Lipham: 1985 : Hersey dan Blandcard: 1982, Boles, 1983), yaitu berupa keterampilan dan kemampuan dasar manajerial yang diantaranya: (1) keterampilan konseptual; (2) keterampilan teknis; dan (3) keterampilan manusiawi.

Proses perencanaan merupakan langkah awal dan bagian yang sangat penting dalam sistem manajemen apapun. Terlebih pada kontek arah tujuan tertentu, sistem manajemen

mebutuhkan sistem perencanaan startegik yang terarah. Dalam proses penerapan perencanaan strategis yang dilakukan oleh kepala sekolah, kepala sekolah pada dasarnya menggunakan beberapa model strategi, antara lain: (1) model perencanaan komprehensif; (2) model perencanaan penetapan target; (3) model perencanaan efektivitas biaya; dan (4) model perencanaan, pemrograman, penganggaran (PPBS). Maka tata cara penyusunan perencanaan strategis adalah: (a). Visi. Merumuskan visi organisasi dan lulusan; (b). Misi, Merumuskan misi organisasi dan lulusan; (c). Nilai. Mengembangkan nilai-nilai organisasi dan lulusan; (d). Analisis Internal. Melakukan analisis internal; (e). Analisis Eksternal. Melakukan analisis eksternal dan kebutuhan lulusan; (f) Asumsi. Merumuskan asumsi dan mutu lulusan; (g). Analisis dan Pilihan Strategis. Menyusun analisis strategis dan memilih strategi mutu lulusan; (h). Faktor-faktor penentu keberhasilan. Merumuskan faktor-faktor kunci keberhasilan lulusan; (i). Tujuan. Merumuskan sasaran organisasi dan lulusan; (j). Sasaran dan strategi perusahaan. Merumuskan sasaran dan strategi operasional mutu lulusan. (Asep Saepul Hidayat, Ilma Sripa N. 2024).

Kepala sekolah harus dapat membuat perencanaan yang luwes, yang sesuai dengan kebutuhan, yang dapat memprediksi apa yang mungkin akan terjadi di masa dating sesuai dengan perkiraan dan analisis yang dilakukan, yang dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki kejelasan tentang tahapan-tahapan yang diinginkan dengan melibatkan semua sumber daya pendidikan yang ada. Intinya kepala sekolah harus dapat membuat perencanaan yang baik yang mampu akan mencapai tujuan yang diinginkan. Ciri-ciri perencanaan yang baik dan dipandang akan mampu mencapai tujuan adalah: (1) Harus didasarkan pada fakta dan data-data

yang jelas yang terbukti kebenarannya; (2) Merupakan suatu pekerjaan mental yang memerlukan pemikiran, imajinasi, dan kesanggupan melihat ke depan; (3) Harus sanggup mengetahui kemungkinan-kemungkinan kesulitan yang akan muncul dan menyiapkan jalan keluarnya; (4) Terdiri dari keputusan-keputusan yang diambil mendahului tindakannya; dan (5) Bersangkutan dengan unsur-unsur perubahan dan perbaikan.

Tujuan dari penguasaan konsep dasar perencanaan sebagaimana kita pelajari adalah agar setiap teknis ataupun aplikasi suatu ilmu perlu dikuasai terlebih dahulu. Pengertian konsep-konsep yang terkandung di dalamnya; seperti ruang lingkup serta jenis-jenis, dan tingkatan dari konsep tersebut harus dirinci. Penguasaan suatu konsep perencanaan memudahkan langkah-langkah selanjutnya, baik berdasarkan indikator-indikator dari setiap konsep maupun klasifikasi dan komponen-komponen proses perencanaan, termasuk perencanaan pesan dan media komunikasi.

Dari beberapa pengertian, perencanaan strategik adalah proses yang penting bagi organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Proses ini melibatkan berbagai langkah yang meliputi: (1). Menetapkan visi dan misi organisasi; (2). Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi; (3). Merumuskan tujuan dan strategi organisasi; (4). Mengembangkan kebijakan dan program untuk mencapai tujuan; (5). Menentukan sumber daya yang dibutuhkan; (6). Melaksanakan dan mengevaluasi program; (7). pendidikan dapat meningkatkan peluangnya untuk mencapai tujuan dan misinya. (Ading R S. Asep Saepul H. 2024)

Berdasarkan kajian observasi yang dilakukan penulis dalam proses perencanaan penerapan sistem manajemen pendidikan